



► PENDIDIKAN INKLUSI

ULD Kota Jogja Tambah Personel GPK

MERANGSANG—UPT Layanan Disabilitas (ULD) Kota Jogja menambah jumlah guru pendamping khusus (GPK) di tahun ini. Penambahan ini untuk memaksimalkan pendidikan inklusi di sejumlah sekolah yang ada di Kota Jogja.

Kepala ULD Kota Jogja, Aris Wibowo menjelaskan penambahan GPK untuk membimbing peserta didik penyandang disabilitas ini bertujuan agar kualitas pendidikan inklusi di Kota Jogja tetap terjaga. "Jangan sampai kualitas pendidikan inklusi di Kota Jogja ini menurun," ujarnya, Jumat (19/1).

Ada sebanyak 10 orang GPK baru untuk sekolah negeri dan lima orang GPK untuk sekolah swasta pada 2024. Sebelumnya, ULD sudah memiliki 120 personel GPK di sekolah negeri dan 50 GPK di sekolah swasta. Dengan adanya tambahan ini, total guru khusus ini akan berjumlah sebanyak 185 orang untuk tahun anggaran 2024.

Meski demikian, ia mengakui jumlah GPK juga berkurang karena ada beberapa yang lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. Maka, penambahan ini untuk menambal kekurangan.

"Untuk itu, sebagai upaya menjaga kualitas layanan inklusi, ULD menambah jumlah personel GPK. Ketika GPK itu berkurang, maka harus segera mendapatkan gantinya selama sekolah itu secara kualitas belum mampu melaksanakan pendidikan inklusi tanpa GPK," katanya.

GPK baru ditempatkan di sekolah yang GPK sebelumnya lolos CPNS dan PPPK, dan di sekolah yang belum memiliki GPK. "Kami melihat mana sekolah yang mendesak membutuhkan GPK. Nanti kami juga akan mencari sembilan GPK baru untuk menambal sulam lagi," kata dia.

Menurutnya, GPK masih memiliki peranan penting di setiap sekolah. GPK merupakan perpanjangan tangan dari ULD dalam melaksanakan pendidikan inklusi dan membantu sekolah. "GPK ini punya peran penting untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah agar pendidikan inklusi berjalan lancar, intinya di situ," kata dia.

Di sisi lain, Aris berharap semua sekolah sudah benar-benar dapat menjalankan pendidikan inklusi dan memiliki program untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Setiap sekolah harus mampu mengembangkan program untuk ABK agar tidak sekadar melaksanakan pendidikan inklusi secara normatif.

"Jadi ketika ditanya apakah sekolahnya inklusi, kalau iya programnya apa? Harus punya program yang berbeda dengan sekolah lainnya. Mungkin bisa vokasi, mungkin ada bina diri, atau mungkin setidaknya punya Program Pembelajaran Individual [PPI]," katanya.

(Lupet Subarrah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005